



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI PAPUA SELATAN**

*

**

**

*

JAKARTA 2023



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI PAPUA SELATAN
4-8 OKTOBER 2023

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Papua Selatan adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Juli 2023.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 21 Agustus 2023.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Papua Selatan adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Papua Selatan adalah untuk melakukan:

1. Diskusi mengenai Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem di Taman Nasional Wasur;
2. Panen Bersama dan Diskusi mengenai Upaya Pengembangan Pangan dan Pertanian Daerah dalam rangka Menjaga Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan di Kabupaten Merauke;
3. Peninjauan terkait Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Merauke; serta
4. Peninjauan terkait Ketersediaan Stok Beras di Gudang Perum Bulog.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Papua Selatan dipimpin oleh Bapak Budhy Setiawan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI) dan diikuti oleh Para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Papua Selatan dilaksanakan pada tanggal 4 - 8 Oktober 2023. Kunjungan Kerja dilaksanakan di:

1. Bumi Perkemahan Taman Nasional Wasur, Rawa Biru, Kecamatan Sota, Kabupaten Merauke;
2. Lokasi Panen Padi di Tanah Miring SP5, Kampung Waningapmiraf, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
3. Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Jl. Nowari- Merauke, Kelurahan Karang Indah, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke; serta
4. Gudang Perum Gudang BULOG II Maro Cabang Merauke, Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke.

B. GAMBARAN UMUM

1. Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem di Taman Nasional Wasur

Hingga tahun 2023, Indonesia memiliki 55 Taman Nasional (TN) dan 130 Taman Wisata Alam yang berada di kawasan konservasi seluas 27,4 Juta hektar dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Pada awal pembentukannya, yaitu tahun 1982, Indonesia baru memiliki 5 taman nasional. Lambat laun jumlah taman nasional semakin bertambah dan pada tahun 2022 lahirnya taman nasional yang ke 55 yaitu Taman Nasional Moyo Satonda. Adapun beberapa di antaranya ditetapkan juga sebagai Situs Warisan Dunia (*World Heritage Sites*) dan Situs Ramsar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pengertian dari Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Pengelolaan taman nasional dilaksanakan oleh pemerintah pusat melalui unit manajemen balai besar taman nasional ataupun balai taman nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.

Taman Nasional (TN) Wasur adalah salah satu taman nasional yang ada di Indonesia. Letaknya berada di bagian tenggara Provinsi Papua Selatan. Namanya merupakan nama salah satu desa di dalamnya. Nama tersebut berasal dari kata bahasa Marori yaitu Waisol yang berarti kebun. TN Wasur merupakan lahan basah yang tergenang air selama 4 - 6 bulan dalam setahun. Di dalamnya terdapat habitat burung migran. Keseimbangan ekosistem di dalam TN Wasur dipengaruhi oleh siklus air. Pada musim kemarau, rawa-rawa terbentuk karena air surut melalui parit-parit alami yang terhubung ke laut.

Biodiversitasnya membuat taman ini dijuluki sebagai "Serengeti Papua". Sekitar 70% dari luas wilayah ini terdiri dari sabana, sementara vegetasi lainnya merupakan hutan rawa-rawa, hutan monsun, hutan pantai, hutan bambu, padang rumput dan hutan sagu. Tanaman yang dominan meliputi spesies mangrove, Terminalia dan Melaleuca. Kawasannya merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua Selatan dan sedikit terganggu oleh aktivitas manusia. Ini disebabkan oleh adanya masyarakat adat yang bertempat tinggal di dalam kawasan dan merupakan pemilik hak tanah ulayat hutan adat. TN Wasur juga merupakan tempat konservasi eksitu bagi beragam jenis mangga.

TN Wasur adalah salah satu taman nasional yang ada di Indonesia yang terletak di bagian tenggara Provinsi Papua Selatan. Namanya merupakan nama salah satu desa di dalamnya. TN Wasur merupakan lahan basah yang tergenang air selama 4 - 6 bulan dalam setahun. Di dalamnya terdapat habitat burung migran. Keseimbangan ekosistem di dalam TN Wasur dipengaruhi oleh siklus air. Pada musim kemarau, rawa-rawa terbentuk karena air surut melalui parit-parit alami yang terhubung ke laut.

Dalam sistem koordinat geografi, kawasan TN Wasur terletak antara 140° 29' - 141° 00' Bujur Timur dan 08° 04' - 09° 07' Lintang Selatan. Dalam pembagian administratif Indonesia, TN Wasur masuk dalam wilayah Kabupaten Merauke di 4 kecamatan. Kecamatan-kecamatan ini ialah Kecamatan Merauke, Kecamatan Jagebob, Kecamatan Sota dan Kecamatan Naukenjarai.

Biodiversitas yang dimiliki oleh TN Wasur membuat taman nasional ini dijuluki sebagai "Serengeti Papua". Sekitar 70% dari luas wilayah ini terdiri dari sabana, sementara vegetasi lainnya merupakan hutan rawa-rawa, hutan monsun, hutan pantai, hutan bambu, padang rumput dan hutan sagu. Tamana yang dominan meliputi spesies mangrove, Terminalia dan Melaleuca. Kawasannya merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua Selatan dan sedikit terganggu oleh aktivitas manusia. Ini disebabkan oleh adanya masyarakat adat yang bertempat tinggal di dalam kawasan dan merupakan pemilik hak tanah ulayat hutan adat. TN Wasur juga merupakan tempat konservasi eksitu bagi beragam jenis mangga.

Jenis tumbuhan yang mendominasi hutan di kawasan taman nasional ini antara lain api-api, tancang ketapang dan kayu putih. Jenis satwa yang umum dijumpai antara lain kanguru pohon, kesturi raja, kasuari gelambir, dara mahkota/mambruk, cendrawasih kuning besar, cendrawasih raja, cendrawasih merah, buaya air tawar, dan buaya air asin. Lahan basah di taman nasional ini merupakan ekosistem yang paling produktif dalam menyediakan bahan pakan dan perlindungan bagi kehidupan berbagai jenis ikan, udang dan kepiting yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Berbagai jenis satwa seperti burung migran, walabi dan kasuari sering datang dan menghuni Danau Rawa Biru.

TN Wasur merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat adat Kanume di Kabupaten Merauke. Pemanfaatannya berupa penyulingan minyak kayu putih. Masyarakat adat Kanume juga bekerja sama dengan suku Marori, suku Mengey dan suku Yeinan.

2. Upaya Pengembangan Pangan dan Pertanian Daerah dalam rangka Menjaga Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan di Kabupaten Merauke

Ketahanan pangan Nasional mengalami gangguan akibat kekeringan. Tahun ini, terjadi fenomena El Nino yang membuat curah hujan lebih rendah dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga pasokan air berkurang. Juli 2023, India sebagai eksportir terbesar di Dunia khususnya beras, telah membatasi ekspornya. Beberapa ahli mengatakan bahwa pembatasan tersebut berpotensi menimbulkan keterbatasan pangan bagi negara yang bergantung beras India.

Pada bulan Agustus 2023, BPS menyatakan bahwa luas panen padi berpotensi turun 1,55% dan produksi beras turun 4,01% dibanding bulan sebelumnya. BPS juga mencatat bahwa inflasi harga beras sangat tinggi. Pada Agustus 2023, inflasi atau kenaikan indeks untuk harga beras telah mencapai 13,76%, sedangkan data inflasi untuk beras yang terjadi pada Oktober 2015 sebesar 13,44% dan inflasi tertinggi untuk beras tercatat pada Juni 2012 sebesar 16,23%.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan kenaikan harga beras, tetapi sisa stok yang dimiliki oleh Perum Bulog sangat terbatas sehingga Pemerintah harus melakukan impor beras di beberapa Negara. Berdasarkan catatan yang diperoleh dari Perum Bulog, Pemerintah mengimpor beras di Tahun 2023 sebanyak 2 juta ton dan berasal dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India, Myanmar, dan Kamboja.

Origin/Posisi		Thailand	Vietnam	Pakistan	India	Myanmar	Kamboja	Jumlah
Kontrak		829.760	872.700	182.540	5.000	100.000	10.000	2.000.000
Realisasi	Selesai Bongkar	505.850	519.440	2.488	5.200	-	-	1.032.978
	Sedang Bongkar	-	67.050	-	-	750	-	67.800
	Dalam Perjalanan	7.300	41.800	10.000	-	5.100	-	64.200
	Sedang Muat	41.000	14.300	12.500	-	-	-	67.800
	Packing/Produksi	275.610	229.910	157.552	-	94.150	10.000	767.222
	Jumlah	829.760	872.500	182.540	5.200	100.000	10.000	2.000.000

Rekap Penerimaan Impor Beras Tahun 2023 sebanyak 2 (Dua) Juta Ton

Provinsi Papua Selatan merupakan salah satu wilayah Indonesia bagian timur yang ditargetkan oleh Pemerintah menjadi salah satu lumbung pangan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi serta penguatan transformasi di berbagai sektor.

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan, program food estate menjadi proyek prioritas strategis dan Merauke menjadi salah satu lokasinya. Upaya cetak sawah baru terus dilakukan, sejalan dengan pembukaan hutan untuk agroindustri perkebunan dan kayu. Hingga akhir 2021, jumlah lahan yang ditanami padi di Merauke mencapai 61.816 ha per tahun dan bisa menghasilkan sekitar 300.000 ton gabah kering dari dua kali masa panen. Sedangkan hingga akhir 2021, total produksi beras di Merauke mencapai 154.000 ton, sementara kebutuhan konsumsi beras di daerah ini hanya sekitar 25.000 ton. Pengiriman kelebihan beras dari Merauke telah dilakukan hingga luar pulau, terutama ke Pulau Jawa.

Dalam 3 tahun terakhir, produksi pertanian Merauke mengalami penurunan. Penurunan ini bukan hanya terkait dengan perubahan iklim, ketersediaan bahan baku mulai dari bibit hingga pupuk juga terkendala. Kondisi perubahan iklim dan El Nino, mempengaruhi jumlah produksi padi di Provinsi Papua Selatan. Pada bulan Agustus 2023 yang lalu, beberapa

kabupaten di Provinsi Papua Selatan melaporkan ketersediaan beras sangat terbatas dan harga beras mengalami peningkatan. Harga beras pada akhir bulan Juli 2023 berkisar Rp14.000 per kilogram dan tertinggi Rp16.000 per kilogram

3. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Merauke

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur akhirnya ditetapkan dan diundangkan pada 6 Maret 2023. Tujuan Penangkapan Ikan Terukur adalah untuk memastikan kelestarian sumber daya ikan tetap terjaga dan dapat memberikan kesejahteraan nelayan, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, kepastian berusaha, kontribusi bagi dunia usaha serta bagi negara.

Konsep pengendalian Penangkapan Ikan Terukur dilakukan dengan perizinan yang mempertimbangkan kuota per kapal (output control). Kuota penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dibagi tiga, yaitu kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota kegiatan bukan untuk tujuan komersial.

Penetapan kuota industri pada prinsipnya berdasarkan wilayah zona maritim, yaitu di atas 12 mil laut yang merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) menjadi kewenangan KKP (izin pusat). Sementara kuota nelayan lokal merupakan wilayah teritorial (di bawah 12 mil laut) dan menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam hal ini kesiapan penerapan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui penerapan peraturan turunannya serta dukungan proses perizinan berusaha merupakan hal yang sangat penting dalam rangka implementasi Penangkapan Ikan Terukur sehingga tidak menyebabkan terciptanya iklim usaha yang tidak kondusif dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakpastian.

Selanjutnya, dukungan program bantuan kepada nelayan dalam rangka pelaksanaan PIT juga sangat berpengaruh dalam mencapai target pelaksanaan kebijakan dimaksud.

4. Ketersediaan Stok Beras di Gudang Perum Bulog

Permasalahan fluktuasi harga dan keterbatasan stok beras di beberapa wilayah juga terjadi di Provinsi Papua Selatan. Dalam upaya menekan harga beras, Pemerintah telah berupaya menurunkan harga melalui kebijakan pemberlakuan HET beras, penyaluran bantuan pangan, dan melakukan Operasi Pasar/SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) melalui Perum Bulog. Adapun pemberlakuan HET beras terbaru per kilogram:

- a. Beras medium saat ini ditetapkan Rp10.900 per kg untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi), Rp11.500 per kg untuk Zona II (Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, dan Kalimantan), dan Rp11.800 per kg untuk Zona III).
- b. Beras premium adalah Rp13.900 per kg untuk Zona I (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi), Rp14.400 per kg untuk Zona II (Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, NTT, dan Kalimantan), dan Rp14.800 per kg untuk Zona III).

(Per 27 September 2023 yang lalu, Media elektronik setempat melaporkan bahwa harga tertinggi beras premium dilaporkan mencapai Rp18.150 per kg di Papua, dan terendah Rp13.780 per kg di Sulawesi Selatan. Sedangkan, harga tertinggi beras medium hari ini mencapai Rp16.030 per kg di Papua, dan terendah Rp11.990 per kg di Kalimantan Selatan).

Di Tahun 2023, Perum Bulog baru merealisasikan pengadaan gabah/beras Dalam Negeri sebesar 850.815 ton setara beras (per 1 Oktober 2023). Total pengadaan tersebut berasal dari CBP sebesar 244.514 ton dan komersial 606.301 ton. Ketersediaan stok beras yang dimiliki oleh Perum Bulog per 1 Oktober 2023 yaitu CBP di gudang sebesar 773.433 ton, CBP dalam perjalanan senilai 838.072 ton, dan beras komersial sebesar 69.958 ton (Total 1.681.463 ton).

Stok CBP Perum Bulog tersebut, diperoleh dari penerimaan impor beras Tahun 2023 yang dilakukan sesuai penugasan dari Pemerintah sebesar 2 juta ton. Adapun laporan impor beras yang diterima Perum Bulog per 1 Oktober 2023 yaitu:

Origin/Posisi		Thailand	Vietnam	Pakistan	India	Myanmar	Kamboja	Jumlah
Kontrak		829.760	872.700	182.140	5.200	100.000	10.000	2.000.000
Realisasi	Selesai Bongkar	503.103	564.787	2.488	5.200	2.875	-	1.078.453
	Sedang Bongkar	-	81.250	-	-	2.225	-	83.475
	Dalam Perjalanan	7.300	4.850	7.500	-	2.750	-	22.400
	Sedang Muat	60.750	63.950	16.500	-	12.814	-	154.014
	Packing	54.800	51.200	47.950	-	47.186	10.000	211.136
	Produksi	204.007	106.663	107.702	-	32.150	-	450.522
	Jumlah	829.960	872.700	182.140	5.200	100.000	10.000	2.000.000

*Data per 1 Oktober 2023

Di beberapa wilayah, harga beras masih mengalami peningkatan walaupun Perum Bulog telah melakukan Operasi Pasar/SPHP dan pemberian Bantuan Pangan. Bantuan Pangan Tahap 2 dilakukan sesuai dengan penugasan Badan Pangan Nasional dan diberikan guna mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras. Periode yang diberikan bulan September-November 2023 dengan sasaran 21,3 juta KPM dan alokasinya sebesar 10 kg/KPM/bulan.

Khusus untuk Provinsi Papua Selatan, Perum Bulog selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah tidak sanggup melakukan Operasi Pasar secara terus menerus dikarenakan stok yang dimiliki Perum Bulog sangat terbatas. Bulog sampai akhir September 2023 belum mampu membeli beras dari petani karena harga jual beras petani Merauke masih tinggi dibandingkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu sebesar Rp9.950/kg. Untuk memenuhi stok jatah ASN, TNI-Polri dan bantuan cadangan pangan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat, Perum Bulog Merauke terpaksa mendatangkan beras dari Surabaya.

C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem di Taman Nasional Wasur

a. Penjelasan Kepala Balai Taman Nasional Wasur

- 1) TN Wasur berada pada kawasan hutan konservasi seluas 432.425 hektar, dimana di dalamnya telah dihuni oleh empat suku yaitu Suku

Marori Mengey, Suku Kanume, Suku Yeinan, dan Suku Marind. Keempat suku ini tinggal di kawasan hutan adat yang berada pada zona khusus dalam kawasan TN Wasur yang terdapat pada 8 (delapan) kampung, dimana salah satu kampung tersebut, yaitu Kampung Sota, saat ini telah di-*enclave*.

- 2) Terdapat Jalan Trans-Papua sepanjang sekitar 150 km, yang melintasi TN Wasur di Papua Selatan, yang melewati kampung-kampung di dalam kawasan TN Wasur, Jalan Tras-Papua ini merupakan akses ke ibukota Kabupaten Merauke bagi penduduk 8 kampung di dalam kawasan TN Wasur. Saat ini telah dilakukan perjanjian kerja sama antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat dengan Balai TN Wasur, dalam rangka pembangunan prasarana transportasi dan pengairan berbasis ekosistem, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan pertanian bagi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan TN Wasur.
- 3) TN Wasur bukanlah sekadar kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Melalui pemberdayaan masyarakat lokal, TN Wasur memiliki program pengembangan kawasan wisata yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi dan wisata minat khusus. Tujuan dari program ekowisata ini adalah agar daerah-daerah di sekitar taman nasional juga dapat berkembang dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan Masyarakat, baik di dalam maupun di sekitar kawasan TN Wasur.
- 4) Dukungan yang diperlukan dari Komisi IV DPR RI adalah:
 - a) Pengembangan wisata alam di TN Wasur dengan pemberian akses peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional, melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian akses dalam berperan serta secara aktif dalam kegiatan penyediaan jasa dalam wisata alam, yang memiliki potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - b) Danau Biru yang merupakan ekosistem rawa yang berpotensi mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan, jika tidak tepat dalam pengelolaannya, terutama akibat penggunaan

pestisida dan pupuk yang kurang bijaksana (pembuangan limbah air) dalam pengembangan pertanian di sekitar Danau Biru.

b. Penjelasan dan Aspirasi Kepala Kampung Wasur

- 1) Kampung Wasur merupakan salah satu kampung di dalam kawasan TN Wasur yang terdiri dari 184 Kepala Keluarga dengan lebih 500 jiwa yang berada di dalamnya.
- 2) Diperlukan dukungan kerja sama penyediaan jasa wisata alam bagi masyarakat Kampung Wasur.
- 3) Mengingat keunikan dan kelangkaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat yang terdapat di kawasan TN Wasur, maka perlindungan tidak hanya dilakukan pada sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, namun juga perlindungan pada kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adatnya, dengan memberikan akses peran serta dalam kegiatan konservasi di TN Wasur.

c. Tanggapan Wakil Bupati Merauke

- 1) Salah satu tujuan dari kegiatan konservasi di TN Wasur adalah melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam kawasan taman nasional, dengan mempertimbangkan potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta potensi sumber daya manusianya.
- 2) Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pengelolaan TN Wasur adalah tingginya biaya hidup di Kabupaten Merauke dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten lain di sekitar TN Wasur, sehingga diharapkan Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan TN Wasur dapat diberikan bantuan Program Peningkatan Ekonomi Produktif yang merupakan salah satu program yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- 1) Komisi IV DPR RI mendorong agar kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilaksanakan di TN Wasur melalui 3 Pilar (Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan, dan Pemanfaatan secara Lestari) sebagaimana amanat dalam UU Nomor 5 Tahun 1990, mendapatkan dukungan dari semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional serta pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong agar pengelolaan TN Wasur dapat memberikan manfaat kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional, dalam rangka meningkatkan rasa memiliki hingga akhirnya masyarakat dapat berperan serta aktif dalam menjaga kelestarian sumber daya hayati dan ekosistemnya.
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung pengembangan wisata alam di TN Wasur melalui pemberian akses peran serta masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional, melalui pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian akses dalam berperan serta secara aktif dalam kegiatan penyediaan jasa dalam wisata alam, yang memiliki potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan dan terutama instansi berwenang terkait untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, terutama terkait penggunaan pestisida dan pupuk serta bahan kimia lainnya secara bijaksana dalam rangka mencegah dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada ekosistem Danau Biru yang berada dalam kawasan TN Wasur.
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong Balai Taman Nasional Wasur agar dapat menyusun dokumen kajian strategis dalam pengelolaan TN Wasur yang berisi rencana pengembangan eduwisata dalam rangka pemanfaatan secara Lestari sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya yang dimiliki oleh TN Wasur dengan memperhatikan kearifan lokal Masyarakat.

2. Upaya Pengembangan Pangan dan Pertanian Daerah dalam rangka Menjaga Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan di Kabupaten Merauke

- a. Target tanam dan realisasi tanam komoditas padi Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan masa tanam Rendeng 2022/2023

Target Luas Tanam Padi (Ha)		
Oktober- Maret	April- September	Total (Ha)
9.664	8.672	18.336
Realisasi Tanam (Hektar)	Okt 2022	106
	Nov 2022	3.191
	Desember 2022	2.920
	Jan 2023	804
	Februari 2023	484
	Maret 2023	163
Total Tanam (Ha)		7.668
Total Panen (Ha)		7.563
Puso (Ha)		105

- b. Target tanam dan realisasi tanam komoditas padi Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan masa tanam Gadu 2023

Target Luas Tanam Padi (Ha)		
Oktober- Maret	April- September	Total (Ha)
9.664	8.672	18.336
Realisasi Tanam (Hektar)	Okt 2022	258
	Nov 2022	1.211
	Desember 2022	3.047

	Jan 2023	761
	Februari 2023	825
	Maret 2023	350
Total Tanam (Ha)		6.452
Total Panen (Ha)		4.516
Puso (Ha)		297

c. Tanggapan Pemerintah Daerah dan Petani

- 1) Kabupaten Merauke potensi pertanian $\pm 1,2$ juta Ha dengan 22 Distrik, 179 kampung, 11 kelurahan. Potensi yang bisa digunakan adalah komoditas pajale dan hortikultura;
- 2) Beras, cabe, dan bawang merupakan tiga komoditas pangan yang memiliki peran dalam peningkatan inflasi di Kabupaten Merauke. Pada triwulan kedua Tahun 2023, Kabupaten Merauke memberikan peran dalam menurunkan inflasi yaitu 3,17% (MoM) dan mengalami peningkatan sekitar 5,7% (YoY). Namun Saat ini harga pangan mengalami penurunan khususnya harga cabai;
- 3) Kabupaten Merauke memiliki 5 Sentra Pangan, salah satunya adalah Distrik Tanah Miring (penghasil beras);
- 4) Selama 3 Tahun terakhir, Kabupaten Merauke mengalami penurunan produksi dan diharapkan Tahun 2023 Kabupaten Merauke dapat menghasilkan 80 ribu ton (panen gadu);
- 5) Khusus untuk SP5 Distrik Tanah Miring, luas tanamnya 8000 Ha, yang sudah tertanam lebih dari 6000 Ha, panen sekitar 1,7-2 ton per Ha;
- 6) Sebagian besar petani di kawasan Tanah Miring memiliki lahan diatas 2 Ha;
- 7) Permasalahan pertanian di lahan Tanah Miring adalah:
 - a) Membutuhkan BBM bersubsidi untuk petani. Saat ini di wilayah Tanah Miring terdapat 6 SPBU yang bisa menyiapkan BBM untuk petani (2 SPBU di Distrik Tanah Miring dan di wilayah lainnya) dan dibutuhkan 14 SPBU untuk seluruh Kabupaten Merauke;

- b) Pemerintah Daerah telah berkoordinasi dengan Pertamina dan Pupuk Indonesia terkait dengan rencana pemanfaatan Kartu Tani guna mendapatkan BBM Bersubsidi. Terkait dengan hal tersebut diharapkan dapat berjalan apabila seluruh petani di Kabupaten Merauke telah menggunakan Kartu Tani;
- c) Terkait dengan pupuk bersubsidi, Kabupaten Merauke memperoleh 15 ribu ton urea dan 6000 ton NPK. Hampir seluruh sentra pangan di Kabupaten Merauke sangat membutuhkan pupuk bersubsidi dan mendukung agar alokasi pupuk bersubsidi ditambah khususnya untuk jenis NPK;
- d) Pada musim kemarau, lahan pertanian sering mengalami gagal panen sehingga membutuhkan pompanisasi. Pompa yang dibutuhkan berukuran 6 inchi keatas karena air di jaringan primer sudah mengalami pengurangan dan petani bergantung pada tadah hujan;
- e) Disamping itu, perlu dilakukan perbaikan pada saluran yang mengalami pendangkalan dan pintu air beberapa wilayah yang mengalami kerusakan; serta
- f) Membutuhkan bibit unggul.

d. Tanggapan Pemerintah Pusat

- 1) Luas baku sawah di Kabupaten Merauke sebesar 30 ribu Ha dan dalam 1 tahun rata-rata masa tanamnya 2 kali (berarti luas tanam/panen sekitar 60 ribu Ha);
- 2) Produksi beras di Kabupaten Merauke lebih dari 100 ribu ton (pada Tahun 2022 produksi beras sekitar 183 ribu ton beras), dengan kebutuhan konsumsi dalam 1 tahun kurang dari 15 ribu ton; serta
- 3) Kabupaten Merauke merupakan lumbung beras yang bisa menyediakan beras untuk 4 Kabupaten, yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digoel. Disamping itu, sebagian produksi beras juga dijual ke Provinsi Jawa Timur (*apabila biaya distribusinya sesuai*).

e. **Tanggapan PT Pupuk Indonesia Holding Comani**

- 1) Pada Tahun 2023, alokasi pupuk urea Kabupaten Merauke sebesar 11.786 ton dan telah direalisasikan penyalurannya sebesar 2.876 ton atau sebesar 24% dari alokasi;
- 2) Sedangkan untuk alokasi pupuk NPK di Kabupaten Merauke alokasinya sebesar 6.000 ton dan telah direalisasikan sebesar 49% atau sebesar 2.957 ton;
- 3) Stok pupuk subsidi dan non subsidi di Kabupaten Merauke jenis Urea sebesar 1.358 ton dan NPK sebesar 2.356 ton;
- 4) Saat ini telah terjadi shut down internet di Kabupaten Merauke yang mengganggu proses administrasi dengan menggunakan Kartu Tani dan PT Pupuk Indonesia akan memberlakukan sistem manual apabila dalam 3 hari internet tidak berjalan dengan baik; serta
- 5) Terkait dengan jumlah alokasi NPK yang ditambah, Kementerian Pertanian memiliki peran untuk mengatur jumlah alokasi pupuk tersebut.

f. **Tanggapan Komisi IV DPR RI**

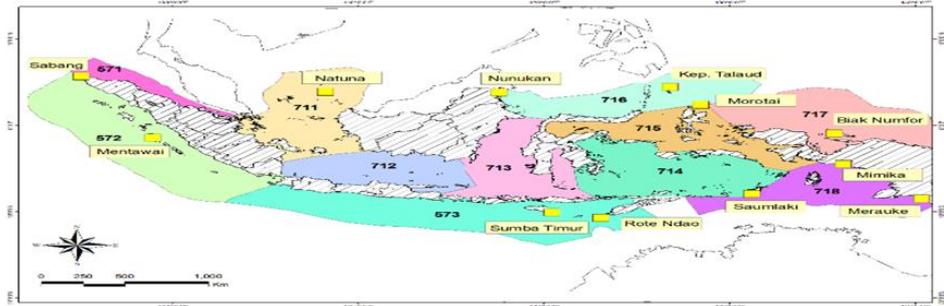
- 1) Terkait dengan pupuk subsidi, Komisi IV DPR RI menyatakan jumlah alokasi yang diberikan telah sesuai, namun terjadi permasalahan di tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Komisi IV DPR RI menilai perlu dilakukan perbaikan karena data RDKK masih belum *update*. Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti dan mengkoordinasikan antara Pupuk Indonesia dan Dinas Pertanian Kabupaten Merauke;
- 2) Terkait dengan BBM subsidi khusus pertanian, Komisi IV DPR RI telah menindaklanjuti dengan Ketua Komisi VII DPR RI dan Pertamina guna memberikan subsidi bensin bagi Alsintan yang digunakan oleh petani di Kabupaten Merauke. Rencana pemberian subsidi tersebut nantinya akan menggunakan sistem Kartu Tani;
- 3) Komisi IV DPR RI mendukung pemenuhan kebutuhan pangan di Provinsi Papua Selatan serta dapat berkontribusi dalam pemenuhan pangan secara Nasional;

- 4) Komisi IV DPR RI mengapresiasi terhadap kinerja Pemerintah Daerah dan petani dalam memproduksi padi di Distrik Tanah Miring; serta
- 5) Komisi IV DPR RI mendorong seluruh stakeholder pangan dapat memperbaiki saluran air, mengusulkan pompa air, benih dan tambahan pupuk NPK.

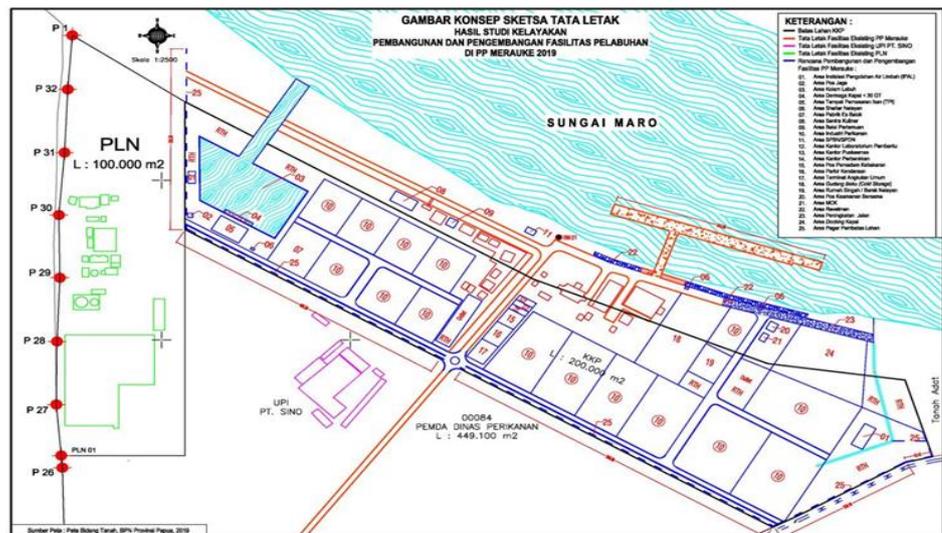
3. Monitoring dan Evaluasi Bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Merauke

a. Penjelasan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

- 1) Gambaran Umum Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke
 - a) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Merauke mulai dibangun tahun 2003 dan telah ditetapkan dan masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RI2PN) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 45/Kepmen-KP/2014.
 - b) Selanjutnya melalui Program Nasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kabupaten Merauke maka ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/Kepmen-KP/2018, tanggal 1 Maret 2018, tentang Penetapan Pelabuhan Perikanan Merauke Sebagai Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia pada tanggal 10 Oktober 2019.
 - c) PPN Merauke berlokasi di Kabupaten Merauke dengan luas wilayah 45.071 km² terletak sangat strategis di kawasan timur Indonesia dan bila dilihat dari aspek wilayah, letak Kabupaten Merauke berada di bibir pantai Laut Arafura dengan panjang garis pantai 775 km berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan Australia.



d) Tata Letak Pembangunan dan Pengembangan PPN Merauke



2) Dukungan yang diperlukan dari Komisi IV DPR RI

- a) Pembangunan Sarana Jalan Tol Laut untuk meminalisir biaya pengangkutan dalam rangka meningkatkan pendapatan nelayan di Kabupaten Merauke.
- b) Dorongan pengaturan penangkapan ikan oleh nelayan lokal maupun luar (yang berasal dari Pantai Utara Pulau Jawa) untuk mitigasi *illegal transshipment*, dalam rangka pengawasan dan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan.
- c) Pembangunan *Docking* Kapal sebagai fasilitas bersandarnya dan bongkar muat kapal ikan dalam rangka mendukung program Penangkapan Ikan Terpadu, untuk pengawasan dan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan.

- d) Pembangunan *Cold Storage* dalam rangka meningkatkan nilai tambah pendapatan dan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Merauke.
- e) Kebijakan pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui subsidi BBM bagi nelayan, dalam rangka dalam rangka meningkatkan nilai tambah pendapatan dan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Merauke.
- f) Dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan lokal melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar dapat bersaing dengan nelayan pendatang.
- g) Dukungan pengaturan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) lokal dalam setiap kapal angkut ikan yang beroperasi di sekitar perairan Kabupaten Merauke.
- h) Dukungan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengaturan keuangan perimbangan pusat daerah.

b. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- 1) Komisi IV DPR RI mendorong adanya pengaturan penangkapan ikan oleh nelayan lokal maupun luar (yang berasal dari Pantai Utara Pulau Jawa) untuk mitigasi *illegal transshipment*, dalam rangka pengawasan dan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan.
- 2) Komisi IV DPR RI mendorong adanya pengaturan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) lokal dalam setiap kapal angkut ikan yang beroperasi di sekitar perairan Kabupaten Merauke, dalam rangka dalam rangka menjamin kepastian kerja dan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Merauke.
- 3) Komisi IV DPR RI mendorong adanya kebijakan pengaturan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui subsidi BBM bagi nelayan, dalam rangka dalam rangka meningkatkan nilai tambah pendapatan dan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Merauke.
- 4) Komisi IV DPR RI mendorong adanya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan lokal melalui pelatihan dan

bimbingan teknis, dalam rangka peningkatan daya asing nelayan lokal yang berada di Kabupaten Merauke.

4. Ketersediaan Stok Beras di Gudang Perum Bulog

- a. Berdasarkan laporan Kinerja Operasional sampai dengan Oktober 2023, Perum Bulog melaporkan untuk kantor Wilayah Papua dan Papua Barat, sebagai berikut:
 - 1) Khusus untuk Kancab (Kantor Cabang) Merauke, Perum Bulog per 1 Oktober 2023 telah merealisasikan pengadaan setara beras sebesar 375 ton atau 17,75% dari target yang ditetapkan dalam 1 tahun (*target 2.116 ton*);
 - 2) CBP yang dimiliki Perum Bulog digunakan untuk SPHP sebesar 10.984 ton, penanggulangan keadaan darurat sebesar 426 ton, dan untuk Golongan Anggaran sebesar 37.422 ton;
 - 3) Perum Bulog juga telah merealisasikan program Bantuan Pangan Tahap 2 yang dilakukan sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional. Khusus untuk Kancab Merauke pagu alokasi selama 3 bulan sebesar 2.314.050 kg dan per 1 Oktober 2023 baru merealisasikan 771.350 kg;
 - 4) Posisi persediaan beras CBP untuk Kancab Merauke per 1 Oktober 2023 sebesar 5.666 ton dengan rincian 5.529 ton merupakan beras CBP dan 137 ton merupakan beras Komersil;
 - 5) Stok komoditas pangan lain yang dimiliki oleh Perum Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat yaitu tepung terigu 0,09 ton; minyak goreng 303,63 kilo liter; dan gula 61 ton; serta
 - 6) Rencana kedatangan beras impor Tahun 2023 di Kanwil Papua dan Papua Barat, per 1 Oktober 2023 untuk tahap 6 dan 8 sedang dalam proses produksi/packing. Tahap 6, total muatan sebesar 9.800 ton dengan jenis vietnam white rice 5% broken dan pelabuhan bongkar berada di Jayapura serta Sorong. Sementara Tahap 8 total muatan 4.900 ton dengan jenis *vietnam white rice 5% broken* dan pelabuhan bongkar berada di Sorong.

- b. Selama Komisi IV DPR RI meninjau ketersediaan beras di gudang Perum Bulog, Perum Bulog memaparkan beberapa permasalahan dan kondisi *te-update* terkait dengan stok dan kinerja Perum Bulog di Kancab Merauke, diantaranya:
- 1) Stok beras yang ada gudang Perum Bulog Kancab Merauke merupakan beras impor/Luar Negeri (*Thailand*). Sementara stok yang berasal dari pengadaan Dalam Negeri telah disalurkan kepada masyarakat;
 - 2) Kabupaten Merauke tahun lalu tidak memproduksi dengan maksimal karena terjadi bencana banjir;
 - 3) Kendala Perum Bulog tidak mampu menyerap gabah/beras petani Kabupaten Merauke dikarenakan harga beras lebih tinggi dibandingkan HPP yang ditetapkan Pemerintah (permasalahan di Kabupaten Merauke sama dengan permasalahan yang terjadi di Pulau Jawa);
 - 4) Sebagian besar beras yang masuk ke Indonesia berasal dari Thailand;
 - 5) Bantuan Pangan tahap 2 yang dialokasikan untuk Provinsi Papua Selatan akan disalurkan 2 bulan sekaligus (20 kg/ KPM);
 - 6) Perum Bulog rutin melakukan SPHP dan menyalurkan ke pasar retail dengan harapan dapat menurunkan harga (karena distribusinya langsung ke konsumen) dan hingga saat ini kegiatan tersebut belum secara signifikan menurunkan harga;
 - 7) Direncanakan sisa beras impor yang akan tiba di Indonesia pada minggu kedua bulan Desember 2023. Stok di Kabupaten Merauke hingga akhir tahun sekitar 5.500 ton dan kebutuhan beras mencapai 700 ton/bulan;
 - 8) Perum Bulog sedang mencoba untuk menyalurkan beras langsung ke kelurahan guna mengurangi biaya operasional/ memotong rantai distribusi;
 - 9) Program Bantuan Pangan seluruh Indonesia disalurkan melalui Kantor Pos.

c. Tanggapan Badan Pangan Nasional

- 1) Perhitungan impor beras Tahun 2023, dihitung berdasarkan rumusan FAO (normal 10%). Berdasarkan rumusan tersebut, CBP diwajibkan 3 juta ton tetapi kemampuan anggaran Pemerintah hanya 1,5 juta ton; serta
- 2) Dalam rangka menekan harga, kegiatan yang paling efektif adalah memotong mata rantai distribusi dengan menyalurkan beras langsung ke masyarakat.

d. Tanggapan Komisi IV DPR RI

- 1) Pemberian Bantuan beras dan kegiatan SPHP tidak mempengaruhi secara signifikan merubah harga beras;
- 2) Stok beras Nasional ada, tetapi Negara tidak mampu mengontrol harga beras; serta
- 3) Pemerintah saat ini tidak bisa menyerap beras petani karena harga ditingkat petani lebih tinggi dibandingkan HPP, dibutuhkan stabilisasi dengan menetapkan HPP baru.

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Komisi IV DPR RI mendorong Balai Taman Nasional Wasur agar dapat menyusun dokumen kajian strategis dalam pengelolaan TN Wasur yang berisi rencana pengembangan eduwisata dalam rangka pemanfaatan secara Lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dimiliki oleh TN Wasur dengan memperhatikan kearifan lokal Masyarakat, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan taman nasional serta pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
- B. Komisi IV DPR RI mendorong seluruh pemangku kepentingan dan terutama instansi berwenang terkait untuk melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan, terutama terkait penggunaan pestisida dan pupuk serta bahan kimia lainnya secara bijaksana dalam rangka mencegah dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada ekosistem Danau Biru yang berada dalam kawasan TN Wasur..

- C. Komisi IV DPR RI mendorong seluruh stakeholder pangan dapat memperbaiki saluran air, mengusulkan pompa air, benih dan tambahan pupuk NPK.
- D. Komisi IV DPR RI mendorong adanya pengaturan penangkapan ikan oleh nelayan lokal maupun luar (yang berasal dari Pantai Utara Pulau Jawa) untuk mitigasi *illegal transshipment*, dalam rangka pengawasan dan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor perikanan.
- E. Komisi IV DPR RI mendorong adanya pengaturan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) lokal dalam setiap kapal angkut ikan yang beroperasi di sekitar perairan Kabupaten Merauke, dalam rangka dalam rangka menjamin kepastian kerja dan kesejahteraan para nelayan di Kabupaten Merauke.
- F. Komisi IV DPR RI mendorong adanya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan lokal melalui pelatihan dan bimbingan teknis, dalam rangka peningkatan daya asing nelayan lokal yang berada di Kabupaten Merauke.
- G. Pemerintah saat ini tidak bisa menyerap beras petani karena harga ditingkat petani lebih tinggi dibandingkan HPP, dibutuhkan stabilisasi dengan menetapkan HPP baru.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Oktober 2023

Ketua Tim,

Ttd.

Budhy Setiawan
A-290

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Taman Nasional Wasur



Tanah Miring SP5



Pelabuhan Perikanan Nusantara Kabupaten Merauke



Gidang Beras Perum Bulog

LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://xnews.id/2023/10/10/kanal/news/lestarikan-taman-nasional-wasur-dpr-minta-pemda-libatkan-masyarakat-adat/4/>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47022/t/javascript>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47021/t/javascript>;

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47023/t/Pemda+Harus+Libatkan+Masyarakat+Adat+Papua+Selatan+Lestarkan+Keanekaragaman+Hayati+Taman+Nasional+Wasur>

<https://www.swadayaonline.com/artikel/13852/Panen-Padi-Di-Merauke-Komisi-IV-DPR-RI-Apresiasi-Petani-Distrik-Tanah-Miring/>

<https://www.rri.co.id/daerah/386569/komisi-iv-dpr-pantau-stok-beras-di-merauke>

<https://www.infopublik.id/kategori/nusantara/784209/kunker-ke-merauke-komisi-iv-ingin-memastikan-efektivitas-pemberian-bantuan>

<https://mediaindonesia.com/ekonomi/618738/panen-padi-di-merauke-komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-petani-distrik-tanah-miring>

<https://monitor.co.id/2023/10/05/panen-padi-di-merauke-komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-petani-distrik-tanah-miring/>

<https://papua60detik.id/berita/komisi-iv-dpr-ri-monev-program-kementerian-di-merauke>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47023/t/javascript>;

<https://www.merdeka.com/peristiwa/panen-padi-di-merauke-komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-petani-distrik-tanah-miring-32372-mvk.html>

<https://xnews.id/2023/10/10/kanal/news/bareng-gapoktan-utama-mandiri-komisi-iv-dpr-ri-gelar-panen-padi-di-marauke/>

<https://www.lintasparlemen.com/gelar-panen-padi-di-marauke-sulaeman-hamzah-alhamdulillah-panen-bisa-sesuai-target/>

<https://www.askara.co/read/2023/10/10/39883/bareng-gapoktan-utama-mandiri-komisi-iv-dpr-ri-gelar-panen-padi-di-marauke>

<https://indoposco.id/nasional/2023/10/05/panen-padi-di-merauke-komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-petani-distrik-tanah-miring>

<https://badanpangan.go.id/blog/post/dampingi-dpr-kunjungan-ke-papua-selatan-nfa-dorong-kolaborasi-wujudkan-ketahanan-pangan>

<https://pangannews.id/berita/1696492525/panen-padi-di-merauke-komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-petani-distrik-tanah-miring>

<https://papua60detik.id/berita/komisi-iv-dpr-ri-monev-program-kementerian-di-merauke>

<https://www.perikananindonesia.co.id/publikasi-dan-informasi/berita/pt-perikanan-indonesia-menghadiri-kunjungan-kerja-reses-komisi-iv-dpr-ri-di-merauke-provinsi-papua-selatan>

LAMPIRAN MITRA PENDAMPING

KEMENTERIAN PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Dr. Ir. SUWANDI, M.Si. 2. Kepala Badan Standardiasi Instrumen Perertanian Dr. Ir. MARTINA SRI LESTARI 3. Sekretaris Badang Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dr. Ir SITI MUNIFAH, M.Si.
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem, Ditjen KSDAE Dr. Ir. Ammy Nurwati, M.M. 2. Direktur Perbenihan Tanaman Hutan, Ditjen PDASRH NURUL IFTITAH, S.Hut., M.Si. 3. Kepala Balai Besar KSDA Papua ATANASIOUS GUNTARA MARTANA, S.Hut., M.H. 4. Kepala Balai TN Wasur YARMAN, S.Hut., M.P . 5. Kepala Balai Pengelolaan DAS Memberamo Dr. IRVAN VALENTINUS SIHOTANG, S.P., M.Si.
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap AGUS SUHERMAN 2. Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Merauke SUSANTO 3. Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan MOCHAMAD IDNILLAH
BADAN PANGAN NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Dr. TRIS RADITIAN 2. Kepala Pokja Restorasi Gambut Wil Kalimantan dan Papua JANY TRI RAHARJO, S.Hut, M.Ec.Dev., M.P.P.
PERUM BULOG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Human Capital PURNOMO SINAR HADI 2. Kepala Divisi Barang dan Jasa ZAENAL ARIFIN
ID FOOD	<p>✓ Direktur Operasional PT Perindo FAJAR WIDIASONO</p>
PUPUK INDONESIA HOLDING COMPANY	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dir. Portofolio & Pengembangan Usaha PT Pupuk Indoensia (Perseto) JAMSATON NABABAN 2. Dir. Keuangan & Umum PT Petrokimia Gresik ROBBY SETIABUDI MADJID